





Sebanyak 40 wakil rakyat DPRD Kota Jogja periode 2019-2024 berfoto bersama di halaman DPRD Kota Jogja, Jalan Ipd Tut Harsono, Jogja, Senin (12/8). Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka oleh KPU Kota Jogja ditetapkan

PDIP memperoleh kursi terbanyak dengan 13 kursi, disusul PAN (6 kursi), Partai Gerindra (5 kursi), PKS (5 kursi), Partal Golkar (4 kursi), Partal Nasdem (4 kursi), Partal Demokrat (2 kursi) dan PPP (1 kursi).

Harian Jogja/Catit M. Harati

Baru Dilantik...

Meski demikian, kata Hery, Setwan akan memfasilitasi setiap anggota Dewan yang akan menggunakan SK pengangkatan untuk pinjaman di bank.

"Ya kalau anggota menghendaki, maka kami siap membantu dalam proses pencairan," katanya kepada wartawan, Senin kemarin.

Hal senada diungkapkan oleh Bendahara DPRD Gunungkidul, Suyono. Menurut dia, proses peminjaman menggunakan SK pengangkatan anggota Dewan merupakan hak masing-masing Dewan. "Kami hanya memfasilitasi saja," kata Yono.

Menurut dia, sejak adanya gladi pra-pelantikan sudah ada bank-bank yang menawarkan pinjaman kepada Dewan terpilih. "Ada dua yang memberikan penawaran. Untuk kepastian sangat tergantung dengan kebutuhan dari masing-masing anggota," katanya.

Yono menjelaskan untuk besaran pinjaman di perbankan sangat bergantung dengan gaji dan tunjangan yang dimiliki anggota. Dia menambahkan jika mengacu terhadap nominal peminjaman anggota Dewan periode lalu, satu SK bisa digunakan untuk peminjaman hingga nominal Rp500 juta. "Kalau nanti ada yang mengajukan, kami akan bantu proses," ungkapnya.

Menurut dia, jika ada anggota Dewan yang mengambil pinjaman, angsuran akan dipotong dari gaji yang diterima setiap bulannya. "Itu akan berpengaruh terhadap uang penghasilan yang dibawa pulang ke rumah setiap bulannya. Semakin besar pinjaman, uang yang dibawa pulang ke rumah akan berkurang," katanya.

Salah satu anggota DPRD Gunungkidul, Ery Agustin S membenarkan adanya bank yang sudah menawarkan pinjaman. Meski tidak menyebut nama bank, upaya sosialisasi sudah didapatkan sejak beberapa hari sebelum pelantikan. "Sudah ada dan bahkan sampai datang ke

rumah untuk menawarkan pinjaman," katanya.

Ery mengaku belum tertarik menggunakan SK pengangkatan untuk meminjam di bank. "Belum kepikiran, tapi untuk anggota Dewan yang lain, saya tidak tahu karena itu jadi urusan masing-masing," katanya.

Kondisi yang sama juga dialami Ketua Sementara DPRD Kulonprogo periode 2019-2024, Akhid Nuryati. Dia mengaku sudah mendapat tawaran dari bank terkait dengan penggunaan SK Dewan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit maupun pinjaman uang. Namun, dia menyatakan belum berpikir untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

"Kalau punya saya [SK Dewan] sementara belum. Belum ada rencana juga," ujarnya kepada *Harian Jogja*, seusi pelantikan.

Sekretaris DPRD Kulonprogo, Yohanes Irianta, mengatakan SK Dewan memang bisa untuk keperluan jaminan utang bank. Di Kulonprogo, bank yang sudah bekerja sama dengan DPRD terkait fasilitas ini antara lain BPD Wates dan BPR Bank Pasar Kulonprogo. "Proses permohonan nanti melalui bendahara gaji DPRD, pemotongan gaji juga melalui bendahara gaji yang sudah bekerja sama dengan bank," kata Irianta.

Irianta mengatakan besaran pinjaman yang diajukan para legislator lewat sistem ini bersifat relatif. Tak ada patokan pasti berapa yang musti diambil. Namun, meski begitu, nominalnya tak sembarang, karena harus menyesuaikan kebutuhan sehari-hari, jumlah gaji beserta tunjangan yang diterima serta lamanya pinjaman. "Untuk jumlahnya bervariasi, bisa sampai ratusan juta," ujarnya.

Rincian gaji

Sekretaris DPRD Kabupaten Sleman Francisca Retno Wisudawati mengatakan sudah ada bank yang meminta informasi terkait

dengan rincian gaji maupun tunjangan anggota Dewan ke Sekretariat DPRD Sleman.

"Bank BPD sudah meminta informasi terkait dengan hal tersebut, selain BPD saya kurang tahu, tapi yang minta *dibuat*in perincian gaji ada blangkanya gitu baru BPD, untuk memfasilitasi peminjaman infonya," kata dia kepada *Harian Jogja*, Senin.

Menurut dia, jika ada anggota Dewan yang mengambil pinjaman ke bank, rencana pelunasan akan dipotong melalui gaji yang diterima setiap bulannya. "Nanti BPD pasti menginformasikan ke sini [Setwan DPRD] minta potong gaji," ucap dia.

Disinggung mengenai besaran pinjaman oleh bank, ia mengatakan hal tersebut bergantung dengan gaji dan tunjangan yang dimiliki anggota serta kebijakan masing-masing bank.

"Jadi kebijakan bank itu mengucurkan pinjaman untuk gaji sekian itu berapa. Itu kalau menggunakan SK untuk proses peminjaman," ucap dia.

Di Jogja, 40 anggota DPRD Kota Jogja dilantik di Ruang Rapat Paripurna, gedung DPRD Kota Jogja, Senin. Pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jogja, dengan disaksikan sekitar 600 undangan, termasuk jajaran Pemkot Jogja.

Dalam pelantikan ini, terpilih ketua sementara DPPRD Kota Jogja, Danang Rudiarmoko dari fraksi PDI Perjuangan. Kepada wartawan ia menjelaskan tugas pertama dirinya dan anggota lainnya adalah menyelesaikan alat kelengkapan. "Secepatnya, sebelum akhir agustus. Kami mau simultan, diawali pembentukan fraksi," ujarnya.

Ia mengatakan nantinya ada enam fraksi, dengan dua partai yang harus bergabung yakni PPP dan Demokrat. Beberapa pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan di antaranya raperd yang masuk ke prolegda dan APBD. (Lapas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Yogyakarta, 15 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005